



FENOMENA HATE SPEECH DAN RUNTUHNYA KEADABAN KULTURAL:

Implementasi Pendidikan Multikultural berbasis Literasi Digital

Winarto Eka Wahyudi

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

ekawahyudi1926@gmail.com

Abstract: *Since the easier access to digital technology based information everyone is free to interpreted and argue for all kinds of phenomena that occur. Issues about politics, education, economics to the most private aspect (read: religion), not escape from public interpretation. This reality certainly has implications on two aspects that are contradictory. This is because the community digests the information it obtains in varied ways, because it departs from the tendency of insight and its preference to certain primordial entities. The logical consequence of this reality is that, on the one hand, the information successfully absorbed by the public has spawned a generation of societies that significantly shapes a higher reading culture, albeit at a glance and a deep level. But on the other hand, the impact of this accessible information access spawned the latak generation, whose knowledge modality through cyberspace feels legitimate to give opinions and interpretations of everything. In this position emerged the seeds of disputes that could lead to social divisions. Nowadays, social media is becoming the lifestyle of society so distancing access to information from the public is not good. There needs to be an in-depth study on the use of digital information appropriately so that the cultural richness of the Indonesian nation does not collapse due to the misuse of social media as a provocative instrument for the fragmentation of the nation's culture.*

Key Word : *social media, multiculturalism, education*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama mayoritas di Nusantara menjadi sebuah simpul organisme yang dominan ditengah masyarakat Indonesia yang multikultural.¹ Realitas ini tentu akan berdampak pada entitas Islam –sebagai agama dan komunitas- di Indonesia dihadapkan pada potensi-potensi yang dilematis di tengah heterogenitas masyarakat. Kondisi

¹ Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Sedangkan dalam hal bahasa, di Indonesia terdapat lebih dari 660 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Di Papua terdapat sekitar 250 bahasa daerah yang digunakan sehari-hari. Di Provinsi Maluku terdapat sekitar 233 bahasa daerah, di Sulawesi ada sekitar 105 bahasa daerah. Di Kalimantan terdapat 77 bahasa, serta 53 bahasa daerah digunakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di Sumatera terdapat 38 bahasa daerah, dan 9 bahasa daerah berkembang di Jawa dan Bali. Adapun agama resmi terdapat 6 yang diakui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, sementara itu masih banyak lagi aliran kepercayaan yang masih dianut oleh suku-suku di pedalaman Indonesia.



masyarakat yang seperti ini, di satu sisi bisa menjadi sebuah kekuatan yang konstruktif-produktif dalam rangka pembangunan bangsa yang lebih luas. Namun di sisi yang lain, jika heterogenitas ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berpotensi besar menjadi kekuatan destruktif yang mampu memporak porandakan Indonesia sebagai bangsa yang selama ini dikenal mampu merawat kemajemukan masyarakatnya.²

Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk melacak masa depan multikulturalisme di Indonesia, yaitu sebagai sebuah kesadaran akan keberagaman yang selama ini mampu dirawat oleh segenap elemen masyarakat. Sejarah bangsa yang besar adalah sejarah bagaimana mampu merawat dan melestarikan berbagai keragaman menjadi satu paduan yang harmonis melalui elemen variasi ideologi keagamaan, sosial-budaya dan politik.

Kesadaran multikultural pada konteks ini dimaknai sebagai kompetensi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keragaman etnik, ras, agama dan suku yang menjadi keniscayaan pluralistic bangsa Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Benyamin Molan, bahwa multikulturalisme merupakan usaha untuk menatakelola kodrat manusia secara lebih arif dan bijaksana, sehingga dapat tercipta masyarakat yang harmonis sesuai dengan perbedaan kodratnya yang setara sebagai sesama manusia.³ Adapun pemaknaan multikultural diluar dari konsep ini, maka tidak termasuk dalam tulisan yang ada dalam kajian ini.

Lalu, kenapa konsep tentang multikultural sangat penting bagi bangsa? Karena sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mampu mengaca kepada Uni Soviet dan Yugoslavia. Kedua Negara besar tersebut hancur karena tak mampu merawat multikulturalitas bangsanya sendiri yang setiap faksi dan elemen kebudayaan mengambil jalan pintas untuk memisahkan diri dari bangunan Negara yang ada. Sehingga, kedua Negara tersebut hanyamenjadi runtunan sejarah yang tak terlacak lagi dari peta dunia saat ini.

Nampaknya telah cukup bagi bangsa Indonesia untuk memiliki sejarah kelam yang menyisakan noda hitam perjalanan peradaban Nusantara. Konflik yang berpotensi subversif kepada Negara dan memicu disintegritas bangsa menjadi pukulan telak yang harus selalu diwaspadai. Pasca tumbangnya orde baru pada tahun 1998, Indonesia tengah memasuki era reformasi di segala bidang. Beragam ekspresi, baik bersifat personal maupun kelompok, secara *legitimate* bisa diekspresikan dengan mendaku pada dua hal, yakni Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Dari sinilah, Indonesia sebagai negara multikultural tengah menghadapi ujian yang sangat serius.

Karena, justru karena kebebasan berpendapat yang diperparah dengan kemudahan akses informasi sebagai dampak dari perkembangan informasi digital, maka sendi-sendi keberagaman bangsa bisa runtuh karena setiap orang mempunyai hak untuk mengatakan apapun yang ia katakan. Merasakan realitas inilah, maka perlu dilakukan kajian konseptual mengenai fenomena ungkapan kebencian yang berpotensi

² Masdar Hilmy, *Islam, Politik dan Demokrasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2014), 22.

³ Benyamin Molan, *Multikulturalisme: Crdas membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis* (Jakarta: Indeks, 2015), 16.



merobohkan dinding keadaban kultural yang selama ini dijunjung tinggi masyarakat Indonesia.

MELACAK MASA DEPAN MULTIKULTURAL DI DUNIA DIGITAL

Dewasa ini, membatasi diri untuk tidak terpengaruh dengan internet adalah sebuah pilihan yang sulit, untuk tidak mengatakan mustahil. Pasalnya, internet saat ini telah menjadi salah satu penentu “denyut kehidupan” manusia. Segala tingkah pola dan derap langkah manusia telah terjejakkan melalui peradaban online. Mulai dari penjualan barang dan jasa, kini internet sudah menjamah di dalam regulasi pemerintahan. Fenomena e-ktip merupakan imbas yang sangat dirasakan masyarakat, bahwa internet saat ini tengah menegakkan tonggak kekuasaannya dipunggung kehidupan masyarakat lintas kelas. Sehingga, pada akhirnya, gelombang globalisasi yang telah menghapuskan batas-batas ruang, ditopang oleh teknologi informasi yang menghancurkan batas-batas waktu, telah dengan sukses mengubah pola kehidupan manusia.⁴

Internet, telah dengan sukses membuateskalasi komunikasi manusia menjadi super cepat. Apa yang terjadi dibelahan dunia lain, akan bisa diakses dan dilihat secara langsung di Indonesia, hari ini dan detik ini juga. Begitupun dengan komunikasi, kini rezim pulsa regular telah runtuh tak berdaya oleh pulsa dengan paket data internet. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap gempuran internet yang menyerang nyaris tanpa perlawanan? Sebagian pihak menganjurkan untuk bersikap cerdas dan tajam menghadapi gelombang internet, namun disisi lain banyak yang apatis sehingga meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan internet. Akan tetapi harus diakui, bahwa kehidupan manusia mendapatkan kemudahan luar biasa melalui internet, sehingga yang realistis adalah bersikap dengan tidak menghanyutkan diri dan tergantung secara terus menerus dengan internet. Sikap ini sangat relevan agar akal pikiran dan nurani mendapatkan porsinya untuk bekerja secara alami dan tetap menjadi komando (*in-command*) dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam pekerjaan, maupun gaya hidup.

Di dunia digital inilah, manusia sebagai makhluk yang berbudaya dapat mengekspresikan konsep interaksi dan tidak terlepas dari orang lain (*homo socius*). Lazimnya, dalam melakukan interaksi inilah manusia jamak menggunakan simbol (*homo symbolicum*). Manusia akan banyak menggunakan benda, gambar, tulisan sebagai simbol untuk mengekspresikan sesuatu. Dalam berinteraksi dengan orang lain inilah, terjadi proses pendidikan yang antara manusia satu dengan yang lain dapat memberikan dan menyampaikan nilai-nilai (baik positif dan negatif), karena manusia adalah makhluk yang mendidik dan terdidik (*homo educandum*).⁵

Pada proses interaksi inilah jamak dijumpai model komunikasi *over-lapping* yang menandai runtuhnya keadaban kultural di dunia maya. Akibat dari semakin mudahnya akses informasi, setiap orang seakan absah menyatakan pendapat dan argumentasi apapun walaupun tidak ditunjang dengan landasan akademik yang mapan. Sehingga,

⁴ HAR Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 93.

⁵ Sekar Purbani Kawuryan, *Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Multikultural* (Fakultas Ilmu Pendidikan: UNY, 2009), 4.



fenomena saling hujat, laknat dan bentuk ujaran-ujaran sarkastik lainnya sangat mudah dijumpai di dunia maya.

Fenomena inilah yang kemudian memancing pihak berwenang (baca: kepolisian) untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian (*hate speech*) di sosial media. Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud dalam SE tersebut, dapat berupa tindak pidana yang diatur baik dalam Kompilasi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP, yaitu yang terkategori antara lain: 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut dan 7) penyebaran berita bohong. Dari semua bentuk ujaran kebencian di atas, memuat tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Adapun masing-masing contoh dari kategori ujaran kebencian di atas antara lain:

Penghinaan

Ungkapan kebencian yang mencerminkan penghinaan ini sebagai contoh pernah dilakukan oleh Pandu Wijaya, Arik S. Wartono, Deni Iskandar, Inul Daratista dan Aron Ashab yang dengan pongah dan sengaja melakukan penghinaan terhadap ulama sebagai simbol keagamaan dan organisasi islam tertentu di Indonesia, adapun artis Inul Daratista dan Aron Ashab juga melakukan penghinaan dalam akun instagramnya menyinggung salah satu panutan ormas islam tertentu sebutan yang tidak etis. Fenomena *hate speech* ini pada gilirannya memantik ketegangan sosial yang berpotensi menghancurkan sendi-sendi kerukunan antar elemen bangsa.⁶

Pencemaran Nama Baik

Kategori ujaran kebencian selanjutnya bahkan dialami oleh presiden yang notabene merupakan simbol Negara. dalam kunjungannya ke Maluku, presiden Jokowi mengenakan Baju adat yang menjadi simbol kebesaran masyarakat setempat. Namun, disaat foto presiden mengenakan baju tersebut menyebar di dunia maya, maka ada sebuah akun facebook yang mengomentari dengan istilah yang tidak selayaknya disematkan kepada kepala Negara. hal ni, tentu membuktikan pada dua hal sekaligus; *pertama*, masih terdapat warga Negara yang tidak menghormati seorang kelapa pemerintahan yang menandakan dangkalnya sikap nasionalisme kebangsaan, *kedua* menyatakan bahwa baju adat tertentu dengan perkataan yang tidak pantas.⁷

Provokasi dan Hasutan

Perbedaan pandangan apalagi ideologi merupakan keniscayaan selama pemikiran manusia mempunyai perbedaan sendiri. Namun, perbedaan ini tak bisa dilegitimasi dengan menggunakan diksi-diksi negative untuk memperkuat pendapatnya agar dipercaya, atau menarik dukungan pada orang lain. Sayangnya, ujaran kebencian ini

⁶ Terkakit berita yang menunjukkan penghinaan di atas bisa di lacak dalam “*Hina Gus Mus "Bid'ah Ndasmu"*, *Karyawan Adhi Karya ini Dipolisikan*” dalam muslimmoderat.net, “*facebooker hina Gus Dur dan Gus Mus, begini yang terjadi*” dalam tribunnews.com, “*bikin heboh di media sosial, ini pengakuan Aron Ashab*” dalam liputan6.com, “*inul daratista terancam diboikot*” dalam liputan6.com, di akses pada tanggal 2 April 2017.

⁷ Informasi mengenai penghinaan kepala Negara ini, salah satunya dapat dijumpai dalam “*Sebuah Akun Facebook Dipolisikan karena Dinilai Hina Adat Maluku*” dalam news.detik.com, di akses pada tanggal 2 April 2017.



pernah dilontarkan oleh pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab yang mengatakan bahwa Pancasila saat ini terletak dipantatnya Soekarno. Selain itu, ujaran yang tidak etis dilontarkan oleh pemuka agama seperti Habib Rizieq adalah panggilannya kepada rival sebagai kutil babi. Ungkapan-ungkapan semacam ini tentu merugikan kerukunan antar masyarakat karena berpotensi terprovokasi sehingga menimbulkan kebencian kepada individu atau kelompok masyarakat yang lain. Tentu saja, akan berdampak pada luluhnya multikulturalisme bangsa Indonesia.⁸

DIMENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN LITERASI DIGITAL

Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dengan mempertimbangan dimensi yang terdapat di dalamnya. James A Bank, mengkategorikan dimensi pendidikan multikultural sebagai berikut:⁹

Dimensi integrasi isi/ materi (*content integration*).

Integrasi isi ini memberi acuan untuk menggunakan contoh, data dan informasi dari berbagai budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan teori-teori dalam setiap informasi. Secara khusus, kemampuan untuk menggabungkan kandungan materi atau informasi yang ada dengan nilai-nilai yang mengandung kata kunci (*key word*) yang mendorong untuk melahirkan cara pandang yang mengedepankan kesadaran akan keragaman budaya, seperti: kerukunan, toleransi, hak asasi manusia, kebebasan dan kesederajatan.

Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*).

Bahwa proses konstruksi pengetahuan merupakan prosedur dimana ilmuwan sosial, behavioral dan ilmuwan alam mengkreasi pengetahuan dan bagaimana asumsi budaya, kerangka rujukan, cara pandang dan bias dalam disiplin ilmu mempengaruhi cara pengetahuan itu tersusun. Suatu dimensi dimana seorang mampu membantu orang lain untuk memahami bagaimana pengetahuan itu terbentuk dan bagaimana itu dipengaruhi oleh ras, etnik dan kedudukan kelas social individu atau kelompok.

Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*).

Salah satu tugas pendidikan dalam merealisasikan program pendidikan multikultural adalah berusaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Pendidikan dalam konteks ini, dapat digunakan untuk membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus. Realita lazim menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak

⁸ Ujaran kebencian yang dilontarkan oleh Habib Rizieq bisa disimak di chanel youtube.com dengan *search engine* “ Habib Rizieq Shihab FPI Menghina Pancasila Bung Karno” / “Habib Rizieq Melecehkan Pancasila?” atau bisa dilacak “Masya Allah! Habib Rizieq Hina Ahok denga sebutan Kutil Babi” dalam terasbintang.com, diakses tanggal 29 Maret 2017.

⁹ James .A. Banks., “*Multikultural Educatian: Historical Development, Dimentions and Practrice*” In *Review of Research in Education*, vol. 19, edited by L. Darling- Hammond. (Washington, D.C.: American Educational Research Association, 1993), 5.



stereotype, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya.

Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equity pedagogy*).

Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari kelompok berbeda ras, etnik dan kelas sosial. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperatve learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*).

Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*).

Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur.

Selanjutnya, dalam rangka merealisasikan pendidikan multikultural berbasis literasi digital, maka diperlukan deskripsi mengenai konsep literasi digital itu sendiri. Literasi digital atau disebut juga dengan literasi informasi digital¹⁰ merupakan suatu konsep yang menjelaskan mengenai literasi di era digital. Kemunculan konsep ini, ditengarai berawal pada 1990-an. Menurut Gilster literasi digital dijelaskan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai format (tulisan, gambar, grafis).¹¹ Gilster juga menjelaskan bahwa konsep literasi bukan hanya mengacu pada kemampuan membaca saja, melainkan membaca yang diorientasikan pada pemaknaan dan pengetahuan secara sekaligus.

Literasi digital –dalam konteks tulisan ini- mencakup penguasaan ide-ide, bukan semata penekanan tombol tertentu untuk memuaskan keinginan tahu pada piranti digital. Jadi Gilster dalam hal ini lebih menekankan pada proses berpikir kritis ketika berhadapan dengan media digital, daripada kompetensi teknis sebagai keterampilan inti dalam literasi digital, serta menekankan evaluasi kritis dari apa yang ditemukan melalui media digital daripada keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengakses media digital tersebut.

Gilster pada tahap selanjutnya menjelaskan bahwa selain seni berpikir kritis, kompetensi yang dibutuhkan yakni mempelajari bagaimana menyusun pengetahuan, serta membangun sekumpulan informasi yang dapat diandalkan dari beberapa sumber yang berbeda.¹² Seseorang yang berliterasi digital perlu mengembangkan kemampuan untuk mencari serta membangun suatu strategi dalam menggunakan *search engine* guna mencari informasi yang ada serta bagaimana menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasinya sevalid dan sebijak mungkin.

¹⁰ Bawden. *Information And Digital Literacies: A Review Of Concepts*“, dalam *Journal of Documentation*, Vol. 57 No.2 Tahun 2001, 218, diakses dalam <http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.ugm.ac.id/doi/pdfplus/10.1108/EUM000000007083>.

¹¹ Gilster, *Digital Literacy*. New York: Wiley, 1997), 1.

¹²*Ibid.*, 3.



PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: UPAYA MENCIPTAKAN KEADABAN KULTURAL DI DUNIA DIGITAL

Secara konvensional, implementasi pendidikan multikultural jamak dilakukan pada institusi sekolah atau lembaga pendidikan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, proses pendidikan tidak bisa dimaknai hanya sebagai aktifitas yang berlangsung dalam sekat ruang kelas atau batasan jam pelajaran tertentu. Fenomena informasi digital, bahkan sekarang telah bermetamorfosis menjadi sumber pembelajaran terbuka (*open educational resources*) yang siapapun bisa mengakses informasi apasaja yang dikehendaki.

Untuk itulah, diperlukan instrument penyeimbang untuk menghadapi gempuran informasi yang menyerang di setiap waktu dan tempat. Secara faktual, upaya membendung arus informasi justru akan melahirkan sikap yang apatis, opsi yang paling rasional adalah dengan membekali seseorang, terutama peserta didik dengan kesadaran multikultural agar tidak dengan mudah melakukan justifikasi-justifikasi yang berpotensi membelah tatanan sosial melalui internet dengan ujaran-ujaran kebencian.

Artikel ini mencoba untuk melakukan kajian multidisipliner antara ilmu pendidikan di satu sisi, serta ilmu sosial dan teknologi informasi pada sisi yang lain. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurai benang kusut atas fenomena runtuhnya kesadaran kebhenaikan yang diperlihatkan di dunia maya. Sehingga, diharapkan akan terurai kesenjangan kultural dewasa ini menjadi problematika di media sosial.

Penggunaan paradigma pendidikan multikultural berbasis literasi digital dititikberatkan pada himpunan sikap, pemahaman ketrampilan menangani dan mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan secara efektif dalam berbagai media dan format dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan, toleransi, demokrasi, keadilan, dan penghargaan kepada etnisitas. Sehingga, implementasi pendidikan multikultural yang diinterasikan dengan kecakapan digital, dalam konteks ini harus mempertimbangkan apa yang diistilahkan dengan hubungan/ menghubungkan (*coomunicating*);¹³ pada faktor inilah para pengguna sosial media mempunyai manajemen *record* (perekaman) pada informasi-informasi kunci atau manajemen arsip yang pada tahapan selanjutnya saat telah ditemukan informasi-informasi yang berpotensi mendiskreditkan kelompok, ras, agama atau etnis lain, bisa dilakukan tindakan penghapusan (*deleting*) informasi untuk menghindari keterpengaruhan terhadap hal-hal yang mengancam keberagaman, dan disisi lain ketika mendapatkan informasi yang “serupa” namun diframing dengan mengedepankan nilai-nilai kerukunan dan toleransi maka pada tahapan selanjutnya bisa dilakukan tindakan pelestarian (*preserving*) atau penyimpanan (*saving*) informasi untuk selanjutnya dipertahankan dalam rangka melahirkan keadaban kultural di dunia cyber.

Dalam konteks manifestasi multikulturalisme pada informasi media sosial, kecapan digital meniscayakan adanya istilah penemuan (*finding*) beragam informasi yang harus dipecah-pecah lagi menjadi dalam rangka pemilihan sumber (*resource of information*) yang dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya penemuan kembali (*refound*) sumber berita serupa yang menyediakan konten informasi dengan sumber yang jelas, kemudian pada

¹³ Asmalinda, *Digital Literasi dan Literasi Media*, Makalah Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, 2013, 6.



tahap selanjutnya adalah pengaksesan (*accessing*)¹⁴ ke publik bahwa sumber berita tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat karena berangkat dari fenomena faktual.

Tentu saja, beberapa tahapan di atas harus dilandasi kompetensi digital selanjutnya, yang menurut Bawden (2008) salah satunya harus mempertimbangkan sikap dan perspektif.¹⁵ Faktor ini, dalam konteks membentuk keadaban kultural di media sosial, harus mengimplementasikan nilai-nilai multikulturalisme yang oleh James A. Bank berguna untuk membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.¹⁶

Sehingga, kecakapan dalam mengakses informasi digital dalam rangka membangun sikap saling menghargai etnisitas yang telah *established* di Indonesia harus diimbangi dengan sikap dan pandangan yang positif terhadap beragam suku, ras dan latar belakang sosial kelompok masyarakat yang lain. Kompetensi ini harus dimiliki sebagai manifestasi kebhenekaan dalam bingkai informasi digital.

Pada tahapan selanjutnya, untuk mengembangkan pendidikan yang adil (*equity paedagogy*) sebagaimana rumusan Bank, seharusnya netizen mempunyai berbagai macam pertemanan lintas budaya baik di facebook, akun web, tweeter dan media sosial lain. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam memperlakukan sumber informasi sebagai media yang dapat mempererat jalinan sosial sejumlah pengguna media sosial dari kelompok berbeda ras, etnik dan kelas sosial. Strategi dan aktivitas digital inilah yang dapat digunakan sebagai upaya menggunakan sumber informasi berbasis digital dengan cara yang adil dan *equality*. Realisasinya antara lain dapat dikembangkan dengan membentuk komunitas netizen lintas kultural dengan cara melakukan kerjasama dalam bidang sosialisasi tentang perdamaian, toleransi, keadilan dan lain sebagainya. Dan bukan dengan cara-cara yang melakukan debat dan saling serang dengan ujaran-ujaran kebencian yang selama ini diperlihatkan di media sosial. Jika cara terakhir ini yang digunakan, bukan hal yang mustahil jika multikulturalitas bangsa Indonesia yang terbingkai dalam *bhenika tunggal ika* akan runtuh akibat dari penggunaan informasi digital yang tidak tepat. □

¹⁴ Charles H Davis dan Debora Shaws, *Intruduction to Information Science and Technologi* (New York: American Psychological Assosiation, 2011), 23.

¹⁵ David Bawden, *Digital Literacies: Concept, Policies and Practices* (California: Peter Lang, 2008), 45.

¹⁶James .A. Banks,. "Multikultural Educatian: Historical Development, Dimentions and Practrice" In Review of Research in Education, vol. 19, edited by L. Darling- Hammond. (Washington, D.C.: American Educational Research Association, 1993), 28, dan D.J Skeel,. *Elementary Social Studies: Challenge for Tomarrow's World* (New York: Harcourt Brace College Publishers, 1995), 53.



DAFTAR PUSTAKA

- Banks, James .A.. “*Multikultural Educatian: Historical Development, Dimentions and Pracrice*” In *Review of Research in Education*, vol. 19, edited by L. Darling-Hammond, Washington, D.C.: American Educational Research Association, 1993.
- Bawden, David. *Information And Digital Literacies: A Review Of Concepts*", dalam *Journal of Documentation*, Vol. 57 No.2 Tahun 2001, 218,
_____ *Digital Literacies: Concept, Policies and Practices*, California: Peter Lang, 2008.
- Davis, Charles H. dan Debora Shaws, *Intruduction to Information Science and Teknologi*, New York: American Psychological Assosiation, 2011.
- Gilster, *Digital Literacy*. New York: Wiley, 1997.
- Molan, Benyamin. *Multikulturalisme: Crdas membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*, Jakarta: Indeks, 2015.
- Hilmy, Masdar. *Islam, Politik dan Demokrasi*, Surabaya: Imtiyaz, 2014.
- Skeel, D.J. *Elementary Social Studies: Challenge for Tomarrow’s World*, New York: Harcourt Brace College Publishers, 1995.
- Tilaar, HAR. *Perubahan Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 93.

